



Sebagian warga Sambirejo usai menerima paket sembako.

KR-Istimewa

Warga Semanu Terima Bantuan Sembako

GUNUNGKIDUL (KR) - Sebanyak 50 KK Perkumpulan Rukun Warga 05 Padukuhan Sambirejo Desa Semanu Kecamatan Semanu Gunungkidul baru-baru ini menerima bantuan dari Tim Dompot 'KR'. Bantuan berupa paket sembako. Setiap paket berisi beras, mi instan, gula, teh, sarden, dan minyak goreng.

Widodo, Ketua RW 05, didampingi Sukino (Ketua RT 06) dan Supriyanto (Ketua RT 07) kepada KR mengucapkan terima kasih karena 50 warganya mendapat bantuan paket sembako sumbangan pembaca 'KR' melalui Dompot 'KR' Ber-

sama Kita Bisa Melawan Virus Korona. Menurutnya, dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, mayoritas warganya masih trauma dengan adanya wabah Covid-19 yang melanda.

"Selain itu, kondisi warga kami mayoritas sudah berusia lansia dan berada di kalangan perekonomian menengah ke bawah, sehingga membutuhkan perhatian serius," katanya sambil menambahkan "Sebanyak 50 paket sembako sudah didistribusikan kepada warga yang berhak menerima. (Fie)-d

HINDARI MAIN HAKIM SENDIRI

Menag Minta Ceramah Tidak Provokatif

JAKARTA (KR) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sangat prihatin dengan kasus perusakan Pondok Pesantren As-Sunnah, Aikmel, Lombok Timur oleh sekelompok orang tidak dikenal pada Minggu (2/1) sekitar pukul 02.10 WITA. Menag meminta semua pihak untuk menahan diri dan mendorong agar kasus ini segera dituntaskan.

Menag Yaqut menyayangkan terjadinya perusakan pesantren. "Tindakan sekelompok orang yang main hakim sendiri merusak pesantren dan harta benda milik orang lain tidak bisa dibenarkan dan jelas merupakan pelanggaran hukum," tegas Menag di Jakarta, Senin (3/1).

Peristiwa perusakan diduga dipicu oleh viralnya ceramah ustadz dari Ponpes As-Sunnah yang mengatakan Makam Selaparang, Sukarbela, Alibatu tain basong (kotoran anjing).

Menag meminta aparat keamanan untuk mengusut kasus ini sesuai aturan hu-

kum yang berlaku. Di sisi lain, dirinya juga berharap masyarakat setempat tetap tenang tidak terpancing dengan aksi tersebut.

Menag juga meminta Kemenag setempat untuk segera melakukan langkah-langkah proaktif agar kasus ini segera tuntas dan kedamaian di Lombok Timur tercipta lagi.

Terkait dugaan adanya hinaan yang disampaikan ustaz pesantren, Menag mengingatkan bahwa para penceramah agar mengedepankan cara-cara yang santun dan tanpa memprovokasi jemaah. Menurutnya, tindakan provokasi akan dapat memancing emosi publik. Para penceramah harus menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menghargai.

"Ceramah harus disampaikan dengan hikmah dan mauidhah hasanah. Bukan dengan cara-cara menghina dan memprovokasi. Hal itu bukan mengundang simpati, tapi emosi," pesan Menag. (Ati)-d

DISERAHKAN KE NEGARA

Aset Rampasan KPK Meningkat

JAKARTA (KR) - Perampasan aset hasil korupsi (*asset recovery*) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2021 yang selanjutnya disumbangkan sebagai penerimaan negara mengalami peningkatan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan, untuk tahun 2021 perampasan aset meningkat Rp 80 miliar atau 27 persen dibandingkan 2020, yaitu dari Rp 294 miliar menjadi Rp 374 miliar.

"Atas jumlah tersebut, asset recovery KPK tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 80 miliar atau 27 persen," jelas Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (3/1).

Diungkapkan, berdasarkan data asset recovery KPK pada tahun 2021 itu, ada sitaan terbaru. Mengenai sitaan baru itu dari tersangka PT Merial Esa (ME) se-

banyak Rp 100 miliar dalam kasus dugaan korupsi terkait pembahasan dan pengesahan RKA K/L APBN Perubahan 2016 untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Dengan demikian, tutur Ali, KPK telah menunjukkan konsistensinya menyumbangkan penerimaan negara karena selama delapan tahun terakhir melalui optimalisasi asset recovery sebagai salah satu pendekatan strategi penindakan kasus korupsi.

Terkait rampasan aset ini ia memaparkan datanya dari penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK. Pada tahun 2014, tercatat total asset recovery KPK sebanyak Rp 107 miliar, 2015 sebanyak Rp 193 miliar, Rp 335 miliar pada 2016, dan Rp 342 miliar di tahun 2017.

Ada pula Rp 600 miliar pada tahun 2018, Rp 468 miliar tahun 2019, Rp 294 miliar tahun 2020, dan Rp 374 miliar pada tahun 2021. (Ful)-d

SOAL KEMENTERIAN KEAMANAN DALAM NEGERI

Mahfud: Pemerintah Belum Bicarakan

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Pemerintah belum pernah membicarakan dan membahas soal pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

Menurut Mahfud di Jakarta, Senin (3/1), wacana itu telah bergulir di publik lebih dari 20 tahun, tetapi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin belum pernah membahas itu.

"Itu wacana publik yang sudah lama, sudah lebih dari 20 tahun. Di Pemerintahan sendiri belum pernah ada pembicaraan tentang itu. Saya tak punya tanggapan, silakan saja. Itu areanya di bidang legislatif," kata Mahfud lewat pesan tertulisnya kepada wartawan.

Wacana membentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri kembali mun-

cul ke publik setelah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan

usulan itu dalam Pernyataan Akhir Tahun 2021 Lemhannas RI di Jakarta, akhir 2021 kemarin. (Ant)-d



Nderek Mangayubagya
HADEGING NAGARI
KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT
KE-275
03 JANUARI 2022



UWM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Kampus Barabara Butaya



Kampus I
nDalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta
Kampus II
Jogja City Mall Lt. 1, Jl. Magelang Km 6, Yogyakarta
Telp. 0274-374352 Fax. 0274-381722



Informasi PMB : 082244347597 (Telp/WA) pmb.widyamataran.ac.id
universitaswidyamataran humas.uwm @humasuw Universitas Widya Mataram



EPAPER
www.kr.co.id



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE

WAKSINASI DAN DISIPLIN PROKES

Resolusi yang Perlu Dicapai di 2022

JAKARTA (KR) - Vaksinasi Covid-19 dan disiplin protokol kesehatan (prokes) merupakan resolusi yang perlu dicapai pada 2022 untuk keluar dari pandemi Covid-19.

"Kita harus punya resolusi. Kita bersama harus keluar dari pandemi ini. Bagaimana disiplin prokes dan mematuhi kebijakan Pemerintah. Untuk yang belum divaksin, resolusinya harus segera divaksin dan disiplin prokes," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Senin (3/1).

Nadia mengatakan, hal istimewa dari vaksinasi dan disiplin prokes adalah membawa bangsa Indonesia cenderung lebih aman dari gelombang lanjutan pandemi Covid-19. "Istimewanya Indonesia, kalau sekarang ini banyak negara sudah gelom-

bang empat dan lima, kita masih gelombang dua dan kita waspada gelombang tiga karena kita tetap patuh prokes," katanya.

Menurut Nadia, Pemerintah masih mengejar pemenuhan cakupan vaksinasi pada kelompok masyarakat rentan yang memiliki kemungkinan keparahan atau meninggal dunia saat tertular SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Terkait latar belakang tersebut, Nadia mengatakan rencana vaksinasi booster atau dosis ketiga sebagai penguat antibodi, perlu mempertimbangkan pemenuhan vaksin pada kelompok rentan.

"Dulu Pemerintah merencanakan bahwa kita akan melakukan pemberian booster kalau 208 juta ditambah anak-anak 26,4 juta ini divaksin dulu," katanya.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Ditjen P2P Kemenkes itu mengatakan, pandemi Covid-19 tidak akan selesai kalau semua orang yang sesuai sasaran vaksinasi belum dapat vaksin lengkap atau dosis pertama dan kedua.

"Karena, kalau ada yang bolong, kan masih ada celahnya, virus tadi masuk dan berkembang biak di sel tubuh manusia," katanya.

Sekda DIY Kadarman Baskara Aji menyatakan, sebetulnya berbagai pihak sudah berupaya mencegah terjadinya kerumu-

nan saat momentum tahun baru. Tapi karena tingginya antusiasme masyarakat dalam merayakan detik-detik pergantian tahun, terjadinya kerumunan menjadi tidak bisa dihindari. Kondisi tersebut mengakibatkan di sejumlah wilayah masih ditemukan banyak kerumunan.

"Munculnya kerumunan itu sangat disayangkan. Padahal Pemerintah Pusat, Pemda, Satpol PP, Kepolisian maupun pihak terkait lainnya sudah berupaya melakukan berbagai cara agar penegakan prokes bisa dilakukan. Munculnya kerumunan itu tetap menjadi bahan evaluasi kami. Mudah-mudahan tidak sampai berdampak pada kenaikan kasus," kata Baskara Aji.

(Ati/Ria/Ira)-d

PRESIDEN BUKA PERDAGANGAN BEI

Bersyukur Vaksinasi Capai 281 Juta

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa syukur atas tercapainya target capaian vaksinasi Covid-19 di akhir tahun 2021 yang sebelumnya telah ditetapkan Pemerintah. Pemerintah telah menyuntikkan sebanyak lebih dari 280 juta dosis vaksin kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.

"Patut kita syukuri, saya sudah khawatir nanti akhir tahun (2021) target 280 juta dosis vaksin bisa disuntikkan ke seluruh masyarakat tercapai atau tidak. Ternyata tadi pagi saya cek sudah berada di angka 281.299.690 dosis," kata Presiden pada peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022 di Gedung BEI,

Jakarta, Senin (3/1).

Kepala Negara menyebutkan, capaian vaksinasi tersebut bukan suatu hal yang mudah, mengingat Indonesia memiliki kondisi geografis yang menantang terutama dalam pendistribusian vaksin ke setiap daerah.

"Hati-hati 280 juta dosis yang disuntikkan itu juga bukan barang yang mudah, menyuntik 280 juta kali dalam waktu satu tahun bukan barang yang mudah. Karena geografi kita yang harus vaksinasi dengan perahu, vaksinasi naik sepeda motor, jalan kaki, atas gunung bukan sesuatu yang mudah," tuturnya.

Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa secara nasional, vaksinasi di Indonesia telah mencapai 70

persen untuk dosis pertama dan 50 persen untuk dosis kedua. "Saat ini dosis yang pertama sudah 79,6 persen, dosis kedua 54,8 persen. Untuk ibu kota-ibu kota provinsi, kota-kota besar yang interaksi masyarakatnya tinggi juga sudah di atas 70 persen dan 27 provinsi telah mencapai target dosis pertama di atas 70 persen," ujar Kepala Negara.

Presiden pun mengapresiasi kerja keras dari semua unsur yang telah mendukung tercapainya target vaksinasi di akhir tahun 2021. Kepala Negara menegaskan bahwa kebersamaan dan gotong-royong merupakan modal utama target tersebut dapat tercapai. (Sim)-d



BANK BPD DIY

BELI TOKEN & BAYAR TAGIHAN LISTRIK

Pakai BPD DIY Mobile Aja

Bisa juga bayar biaya non tagihan listrik

- Biaya pasang baru
- Biaya tambah daya

BANK BPD DIY mobile

Bank BPD DIY | Call 1500061

bpddiy Bank BPD DIY www.bpddiy.co.id